



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
SUB UNIT KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMAD MASROFI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**
3. NHK : **184595**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.116.337.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/36 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 233.870.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/40 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.064.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/48 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 349.375.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/145 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.167.278.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/48 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 253.110.000
6. Tanah Seluas 320 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 762.640.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.129.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 1978, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
4. MOBIL, DAIHATSU B100RS AYLTA Tahun 2016, HADIAH Rp. 60.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SE88 (JARI JARI) Tahun 2016, HADIAH Rp.



10.000.000

6. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKAR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 450.000.000

7. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 235.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 102.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 567.669.290

F. HARTA LAINNYA Rp. 335.000.000

Sub Total Rp. 5.250.906.290

III. HUTANG Rp. 74.552.509

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.176.353.781

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.